

REKOMENDASI
RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA)
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
Kalabahi, 18 – 21 April 2017

1. LATAR BELAKANG

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan untuk mempercepat pelayanan publik yang transparan, efisien dan efektif. Untuk itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres Nomor 3 Tahun 2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Secara singkat, *e-Government* bertujuan untuk memudahkan aktivitas administratif pemerintahan dan menyediakan cara yang lebih efektif dan efisien untuk berbagai kepentingan pelayanan kemasyarakatan Pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik yang berbasis elektronik, dimana *e-government* digunakan sebagai suatu sistem administrasi elektronik mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Saat ini Pemerintah diharapkan meningkatkan kinerja pelayanan public yang prima disegala bidang. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberi penegasan kepada Pemerintah menjunjung tinggi kebebasan masyarakat mengakses berbagai informasi public yang bermanfaat bagi kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.

Pengembangan *e-Government* di Provinsi NTT saat ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota yang dalam implementasinya berupa pembangunan situs web pemerintah daerah, penyediaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan SDM (*brainware*) bidang TIK serta informasi melalui PPID dan media massa.

Dalam rangka mengintegrasikan dan mensinkronisasikan segala berbagai kegiatan di bidang TIK anatar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT maka dilaksanakan Rakorda bidang TIK XIV tahun 2017 bertempat di Kalabahi Kabupaten Alor yang diikuti oleh para Kepala Dinas Kominfo dan Pengelola TIK se-NTT berjumlah 44 orang.

2. DASAR

Dasar penyusunan rekomendasi ini adalah Hasil Rapat Koordinasi Daerah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi ke-14 di Kalabahi, Kabupaten Alor tanggal 18 – 21 April 2017 bertempat di Aula Hotel Pulo Alor, Jalan El Tari, Kalabahi, Kabupaten Alor dengan tema MELALUI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT, KITA TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRASNPARAN, EFISIEN DAN EFEKTIF.

3. TIM PERUMUS

1. Drs. Karoberl Marsianus, M.Pd
2. Drs. Hyro Nawang
3. Drh. Beny Nanjong
4. Dra. Anna Anny Labina
5. Moi N. Anastasia, SE, M.AP
6. Dra. Jane D. Leto

4. PERMASALAHAN

E-Government merupakan pengembangan satu kesatuan sistem. Dimulai dari tahap input/proses, output, outcome sebagai indikator-indikator keberhasilan merupakan bagian tak terpisahkan. Dalam rangka menatap peran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kelembagaan pengolahan data elektronik, maka permasalahan-permasalahan dikelompokkan dalam beberapa aspek antara lain:

1. Forum e-government tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur belum dibentuk;
2. Regulasi Bidang TIK berupa Perda/Perbup/SK sebagai pedoman/acuan penyelenggaraan TIK di lingkungan pemerintahan provinsi NTT belum ada;
3. Infrastruktur TIK terbatas;
4. SDM yang profesional di bidang TIK terbatas;
5. System aplikasi yang terintegrasi belum berjalan.

5. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang ada serta memperhatikan hasil diskusi selama rapat koordinasi berlangsung, maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1. Forum E-Government tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota di Nusa Tenggara Timur perlu dibentuk sebagai bagian dari Forum E-Government Nasional;
2. Kerjasama dengan Pemerintah lainnya yang sudah maju dalam bidang TIK;
3. Regulasi Bidang TIK berupa Perda/Perbup/SK perlu dibuat baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten/Kota;
4. Pembuatan rencana induk pengembangan e-Government di masing-masing kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;

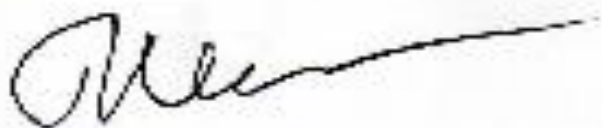
5. Perlu dukungan dana dari berbagai sumber dalam jumlah yang signifikan;
6. Meningkatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan situs resmi pemerintah daerah masing-masing baik dari sisi aplikasi, sumber daya manusia maupun infrastruktur jaringan komunikasi data;
7. Perlunya sinkronisasi program dan kegiatan tahunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Melaksanakan Diklat, bimbingan teknis, workshop maupun magang untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang Pengolahan data elektronik dan TIK (teknologi informasi dan komunikasi).
9. Rakorda diganti nama menjadi Forum E-Government. Pelaksanaanya pada Tahun 2018 di Kabupaten Lembata;
10. Rekomendasi ini akan dievaluasi dalam pelaksanaan Forum E-Government di Lewoleba-Kabupaten Lembata Tahun 2018.

6. PENUTUP

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk diperhatikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 21 April 2017
Mengetahui,

an. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Alor
Kepala Bidang Aplikasi Informatika,



Manoak Bollng Sau, ST
NIP. 19750821 200701 1 013

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



IR, STEFANUS I. RATOE OEDJOE, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620902 199303 1 004

Peserta Rakorda TIK XIV Tahun 2017

an. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kupang,



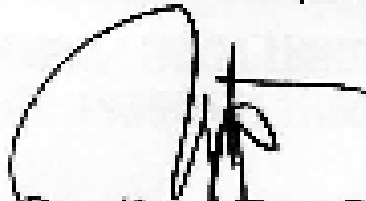
Drs. Agus E. Tupa, M.Si
Nip.

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten SBD,



Drs. Andreas Bora Dedo
Nip. 195912031995031001

an. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten TTU,



Drs. Karel Tura Bada
NIP. 196009031989031008

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belu,



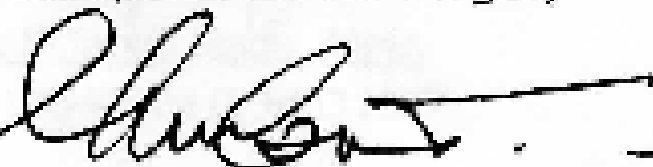
Drs. Kornelis Besin
NIP. 196001031986111001

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ngada,



Moi Nitu Anastasia, SE, M.AP
NIP. 1964241989022003

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sumba Tengah,



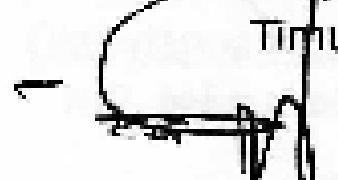
Ir. Agustinus Umbu Tonga
NIP. 195808131986011003

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai Barat,



Drh. Beny Nanjong
NIP. 195909121990031008

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai
Timur,



Drs. Hyro Nawang
NIP. 195812311989031123

an. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ~~Kabupaten~~ Kota Kupang, Sekretaris

Dra. Veronica Patola, MM
NIP. 196105181988032005

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka,

Albertus Bria, S.Ip
NIP. 196405021985031016

an. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Kabid Hubungan Media dan Layanan Informasi,

Aliandu Maria Hermina, BA
NIP. 195906211986032005

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende,

Dra. Anna Anny Labina
NIP. 195802151985022003

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka,

Drs. Krispinus Angelo
NIP. 196005271981031010

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai,

Drs. Silfanus Hadir, MMA
NIP. 196405241994031007

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur,

Drs. Moses Basthian Saipula
NIP. 19590416198601019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat,

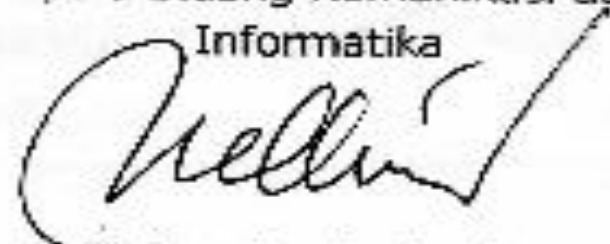
Oktovianus Pangga Laha, S.Ip
NIP. 196010021992031006

an. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Nagekeo
Sekretaris,



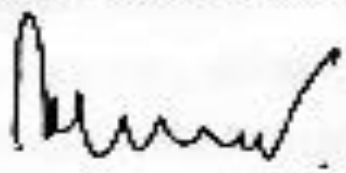
Flaviana Dede Sola
NIP. 196712221994032012

an. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sabu Raijua,
Kepala Bidang Komunikasi dan
Informatika



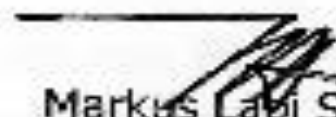
Nelson Loy Lado, SH
NIP. 196402211985031010

an. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Rote Ndao,
Kabid. Informatika



Drs. Wehelmus Mooy, M.Si
NIP.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lembata



Markus Labi S.Sos
NIP. 19680303 199503 1 003